1.132 KELUARGA DI PULANG PISAU MASIH BERISIKO STUNTING

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/

Pulang Pisau (ANTARA) - Penjabat Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.132 keluarga di kabupaten setempat berisiko terdapat kasus stunting, salah satunya adalah Kecamatan Jabiren Raya dan Kahayan Hilir menjadi perhatian pemerintah untuk memasukkan berbagai intervensi dan literasi dalam mempercepat penurunan angka stunting.

"Ada sebanyak 164 keluarga di Kecamatan Jabiren Raya berisiko stunting . Literasi dan intervensi untuk mencegah stunting menjadi terobosan dan langkah kongkrit kita untuk menurunkan stunting di kecamatan ini," kata Nunu Andriani di Pulang Pisau, Senin.

Dikatakan Nunu Andriani, literasi dan intervensi bersama (Libas) stunting oleh Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Puspa kabupaten setempat yang dilaksanakan di Kecamatan Jabiren Raya dan Kahayan Hilir sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penurunan angka stunting.

"Intervensi dilakukan Forum Puspa dengan memberikan bantuan sembako tambahan makanan anak kepada anak yang bergizi buruk dengan harapan angka stunting di Kecamatan Jabiren Raya menurun," ucapnya.

Menurut Nunu Andriani, saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak itu adalah generasi penerus untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Generasi emas tidak akan tercapai apabila anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya sehingga menekankan bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan stunting ini.

Percepatan penurunan stunting, sebut Nunu Andriani, memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua, berkolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga pemerintah di tingkat kecamatan,

kelurahan, sampai desa. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk akademisi, media sosial, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.

Kepala P3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau Deni Widanarni mengungkapkan bahwa dari data angka stunting ada dua kecamatan yang masih tertinggi angka stunting. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kahayan Hilir sebanyak 258 dan Kecamatan Jabiren Raya sebanyak 164 orang.

"Dua kecamatan ini yang menjadi sasaran Forum Puspa Provinsi Kalteng dan Forum Puspa Kabupaten Pulang Pisau," paparnya.

Deni Widanarni berharap pemberian makanan tambahan semakin berkontribusi positif untuk menurunkan stunting di Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Semua memerlukan kolaborasi dan dukungan agar aksi dan langkah kolaboratif.

Sumber Berita:

1. https://kalteng.antaranews.com/berita/710371/1132-keluarga-di-pulang-pisau-masih-berisiko-stunting, Senin, 12 Agustus 2024
2. https://dayaknews.com/pulang-pisau/pemerintah-kabupaten-pulang-pisau-harapkan-stunting-di-wilayahnya-turun-ke-zero-stunting-di-tahun-2024/ Senin, 12 Agustus 2024

Catatan:

Pemerintah Daerah melakukan upaya penurunan kasus stunting yang terjadi pada daerahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pada:

1. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud meliputi :
   a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, kota, dan Pemerintah Desa;
   b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; dan
   c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.